

# TESIS

## **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM UPAYA MENUJU *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)* DI KABUPATEN EMPAT LAWANG**



OLEH  
NAMA : DIAN KARTIKA, SKM  
NIM : 10012682125075

**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (S2)  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2023**

# TESIS

## **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM UPAYA MENUJU *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)* DI KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar (S2)  
Magister Kesehatan Masyarakat Pada Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Sriwijaya



OLEH  
NAMA : DIAN KARTIKA, SKM  
NIM : 10012682125075

**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (S2)  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2023**

# HALAMAN PENGESAHAN

## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM UPAYA MENUJU *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)* DI KABUPATEN EMPAT LAWANG

### TESIS

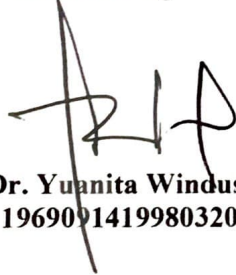
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar (S2) Magister Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya

Oleh :

**DIAN KARTIKA**  
10012682125075

Palembang, 2023

Pembimbing I



**Prof. Dr. Yuanita Windusari, S.Si., M.Si**  
NIP. 196909141998032002

Pembimbing II



**Dr. Misnaniarti, SKM., MKM**  
NIP. 197606092002122001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat



**Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.K.M**  
NIP. 197606092002122001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Karya tulis ilmiah berupa Tesis dengan Judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Upaya Menuju *Universal Health Coverage (UHC)* di Kabupaten Empat Lawang “ telah dipertahankan di hadapan Panitia Sidang Ujian Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya pada tanggal 10 Januari 2023 dan telah diperbaiki, diperiksa serta disetujui sesuai dengan masukan Panitia Sidang Ujian Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya.

**Palembang, 2023**

Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah berupa Proposal Tesis

Ketua:

1. Dr. Haerawati Idris, S.K.M.,M.Kes  
NIP. 198603102012122001

()

Anggota:

2. Prof. Dr. Yuanita Windusari, S.Si.,M.Si  
NIP. 196909141998032002

()

3. Dr. Misnaniarti, S.K.M.,M.K.M  
NIP. 197606092002122001

()

4. Dr. Wahyu Pudji Nugraheni, S.K.M.,M.Kes  
NIP. 197307071999032002

()

5. Dr.dr.Rizma Adlia Syakurah,MARS  
NIP. 198601302019032013


()

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat**

  
**Dr. Misnaniarti, S.K.M.,M.K.M**  
NIP. 197606092002122001

**Koordinator Program Studi  
S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat**

  
**Dr. Rostika Flora, S.Kep., M.Kes.**  
NIP. 197109271994032004

## HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Kartika  
NIM : 10012682125075  
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional  
(JKN) Dalam Upaya Menuju *Universal Health Coverage*  
(UHC) di Kabupaten Empat Lawang

Menyatakan bahwa Laporan Tesis saya merupakan hasil karya sendiri didampingi tim pembimbing dan bukan hasil penjiplakan/plagiat. Apabila ditemukan unsur penjiplakan/plagiat dalam tesis ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Sriwijaya sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.



Palembang, 10 Januari 2023



Dian Kartika

10012682125075

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Kartika  
NIM : 10012682125075  
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional  
(JKN) Dalam Upaya Menuju *Universal Health Coverage*  
(UHC) di Kabupaten Empat Lawang

Memberikan izin kepada Pembimbing dan Universitas Sriwijaya untuk mempublikasikan hasil penelitian saya untuk kepentingan akademik apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak mempublikasikan karya penelitian saya. Dalam kasus ini saya setuju untuk menempatkan Pembimbing sebagai penulis korespondensi (*Corresponding author*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Palembang, 10 Januari 2023



Dian Kartika  
10012682125075

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian."

(Q.S Al-Mujadilah: 11)

"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah, da masing-masing memiliki kebaikan. Bersungguh-sungguhlah dalam (mengerjakan) hal-hal yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan Allah dan janganlah bersikap lemah."

(HR Muslim).

### PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hamba bersyukur atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik.

**Tesis ini saya dedikasikan untuk:**

**Kedua orang tua, suami dan anak-anakku tersayang**

*HEALTH POLICY ADMINISTRATION  
MAGISTER STUDY PROGRAM OF PUBLIC HEALTH SCIENCES  
FACULTY OF PUBLIC HEALTH  
SRIWIJAYA UNIVERSITY  
Scientific papers in the form of thesis,  
January, 10 2023*

*Dian Kartika ; Supervised by Yuanita Windusari and Misnaniarti*

*Implementation Evaluation of the National Health Insurance Program as an Effort  
Towards UHC in Empat Lawang Regency  
xv + 100 pages, 8 pictures, 19 tables, 23 attachment, 52 references*

## **ABSTRACT**

**Background:** As an indication of the government's commitment in implementing the JKN Program, the President issued Presidential Instruction Number 8 of 2017 and Presidential Instruction Number 1 of 2022 regarding Optimizing the Implementation of the JKN Program. Based on data for 2021, Empat Lawang Regency is the district with the lowest participation achievement in South Sumatra Province.

**Objective:** This study aims to evaluate the implementation of the JKN program in an effort towards *UHC* in Empat Lawang District.

**Method:** This study used qualitative design. Informants selection using a purposive technique. In-depth interviews with seven informants, document reviews, and observation were used to collect the data. Using a technique and source triangulation, validate your data. The content analysis method is then used to analyze it.

**Result:** The result showed that in terms of input, the availability of human resources did not meet the standard of public health center manpower according to the Minister of Health Regulation number 75 of 2014 and the target ratio population, there were no written policies such as Regency Policy regarding Optimization of the Implementation of the JKN Program, there was no information system available for proposing membership by Contribution Assistance Recipients of Regional Revenue and Expenditure Budget (PBI APBD). In terms of process, Budget restrictions and a number of other challenges were encountered, and the local government lacked information on those without health insurance. In terms of output, the achievement of JKN Participation in Empat Lawang Regency as of July 2022 was 64.34% which tends to increase from 2021 but has not yet reached the national target.

**Conclusion:** The Regional Government of Empat Lawang Regency has carried out several Instructions instructed in the Second Presidential Instruction. There are several instructions that have not been implemented, such as Non-State Civil Apparatus Membership, JKN Participation is a requirement in the completeness of licensing processing documents; and the imposition of administrative sanctions for Employers other than State Administrators.

**Keywords :** National Health Insurance, Outcomes, Evaluation



ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Karya tulis ilmiah berupa Tesis, 10 Januari 2023

Dian Kartika ; Dibimbing oleh Yuanita Windusari dan Misnaniarti

Evaluasi Pelaksanaan Program JKN Dalam Upaya Menuju *UHC* di Kabupaten Empat Lawang

xv + 100 halaman, 8 gambar, 19 tabel, 23 lampiran, 52 Kepustakaan

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam implementasi Program JKN Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Berdasarkan data Tahun 2021 Kabupaten Empat Lawang merupakan Kabupaten dengan capaian kepesertaan terendah di Provinsi Sumatera Selatan.

**Tujuan:** Untuk mengevaluasi pelaksanaan program JKN dalam upaya menuju *UHC* di Kabupaten Empat Lawang.

**Metode:** Penelitian menggunakan desain kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam kepada 7 informan, telaah dokumen dan observasi. Validasi data yang digunakan triangulasi metode dan sumber. Selanjutnya, dianalisis menggunakan metode analisis konten.

**Hasil:** Penelitian ini menunjukkan dari segi input ditemukan ketersediaan SDM yang belum memenuhi standar ketenagaan puskesmas sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 dan target ratio penduduk, belum tersedia kebijakan tertulis seperti Perda/Perbup terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, belum tersedia sistem informasi untuk pengusulan kepesertaan PBI APBD. Dari segi proses ditemukan kendala berupa keterbatasan anggaran dan ada beberapa kendala dari berbagai segmen serta pemda belum memiliki data masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Dari segi output capaian Kepesertaan JKN di Kabupaten Empat Lawang per Juli 2022 sebesar 64,34% yang cenderung meningkat dari tahun 2021 namun belum mencapai target nasional.

**Kesimpulan:** Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang telah menjalankan beberapa Instruksi yang diinstruksikan dalam Kedua Instruksi Presiden. Ada beberapa instruksi yang belum dijalankan seperti Kepesertaan Non ASN, Kepesertaan JKN menjadi syarat dalam kelengkapan dokumen pengurusan perizinan; dan penerapan sanksi administratif bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.

**Kata Kunci :** Jaminan Kesehatan Nasional, Capaian, Evaluasi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Karunia dan Hidayah-Nya penyusunan tesis dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program JKN Dalam Upaya Menuju UHC di Kabupaten Empat Lawang”**. Tesis ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan kewajiban pembuatan tesis penelitian pada Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya.

Pelaksanaan penelitian, proses penulisan dan penyelesaian tesis ini dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Ibu Dr. Misnaniarti, S.K.M.,M.K.M, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat sekaligus Pembimbing II
3. Ibu Dr. Rostika Flora, S.Kep.,M.Kes, selaku Koordinator Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat
4. Ibu Prof. Dr. Yuanita Windusari, S.Si.,M.Si, selaku Pembimbing I
5. Ibu Dr. Haerawati Idris, S.K.M.,M.Kes, selaku Ketua Penguji
6. Ibu Dr. Wahyu Pudji Nugraheni, S.K.M.,M.Kes , selaku Penguji
7. Ibu Dr.dr.Rizma Adlia Syakurah,MARS, selaku Penguji
8. Kemenkes RI yang telah memberikan kesempatan untuk tugas belajar
9. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
10. BPJS Kesehatan Cabang Empat Lawang

Penulis menyadari tesis ini masih mempunyai kekurangan. Namun demikian, penulis tetap berharap kiranya tesis ini bisa memberi manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain.

Palembang, 2023

Penulis



(Dian Kartika)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan pada tanggal 6 September 1992 di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Putri dari Bapak Yasid dan Ibu Nyimas Aldilah yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 8 Tebing Tinggi pada tahun 2003. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi tahun 2006, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi tahun 2009. Pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan pada Universitas Sriwijaya pada Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan tamat tahun 2013.

Pada tahun 2014 penulis diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Pagaralam. Pada pertengahan tahun 2016 penulis mutasi ke Kabupaten Empat Lawang. Pada tahun 2021 penulis tercatat sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya melalui program tugas belajar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pernyataan Integritas .....	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi .....	vi
Motto dan Persembahan.....	vii
Abstract .....	viii
Abstrak .....	ix
Kata Pengantar .....	x
Riwayat Hidup .....	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Lampiran .....	xvii
Daftar Singkatan.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Maksud atau Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Jaminan Kesehatan Nasional.....	7
2.1.1 Definisi .....	7
2.1.2 Unsur-Unsur dan Prinsip-Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional .	7
2.1.3 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.....	9
2.1.4 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional .....	10
2.1.5 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional .....	10
2.1.6 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional .....	11
2.1.7 Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional .....	13

2.2	Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan .....	13
2.2.1	Tanggung Jawab BPJS Kesehatan .....	13
2.3	Jaminan Kesehatan Cakupan Semesta ( <i>Universal Health Coverage</i> ) .....	14
2.3.1	Definisi .....	14
2.4	Peran Pemerintah.....	16
2.4.1	Peran Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan.....	16
2.4.2	Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Jaminan Kesehatan Cakupan Semesta ( <i>Universal Health Coverage</i> ).....	16
2.5	Kerangka Teori.....	23
2.6	Kerangka Pikir.....	25
2.7	Definisi Istilah .....	26
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	34
3.2	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
3.3	Informan Penelitian .....	35
3.4	Sumber Data .....	37
3.4.1	Data Primer .....	37
3.5	Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	38
3.5.1	Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.5.2	Alat Pengumpulan Data .....	39
3.6	Validitas Data .....	39
3.6.1	Uji <i>Credibility</i> (Validitas Internal).....	40
3.6.2	Uji <i>Transferability</i> (Validitas Eksternal).....	41
3.6.3	Uji <i>Dependability</i> (Reliabilitas) .....	41
3.6.4	Uji <i>Confirmability</i> (Obyektivitas) .....	41
3.7	Pengolahan dan Analisis Data.....	42
3.7.1	Pengolahan Data.....	42
3.7.2	Analisis Data .....	42
3.8	Etika Penelitian .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1	Gambaran Lokasi Penelitian.....	47

4.1.1 Geografis Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 .....	44
4.1.2 Topografi Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 .....	45
4.1.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 .....	46
4.2 Hasil Penelitian .....	47
4.2.1 Karakteristik Informan .....	47
4.2.2 Input .....	48
4.2.3 Proses .....	57
4.2.4 Output.....	69
4.3 Pembahasan .....	72
4.3.1 Input .....	72
4.3.2 Proses .....	81
4.3.3 Output.....	93
4.4 Keterbatasan Penelitian .....	95
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	101

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tugas Bupati/ Walikota menurut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dan Inpres Nomor 1 tahun 2022 .....	24
Tabel 2.2 Definisi Istilah .....	26
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Data Informan dan Data yang Dibutuhkan.....	35
Tabel 4.1 Batas Wilayah Kabupaten Empat Lawang .....	44
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 .....	47
Tabel 4.3 Karakteristik Informan Penelitian .....	48
Tabel 4.4 Jumlah SDM Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Tahun 2022 .....	48
Tabel 4.5 Jumlah SDM Kesehatan di Puskesmas Non Rawat Inap Tahun 2022 ..	49
Tabel 4.6 Ketersediaan SDM Kesehatan di Kabupaten Empat Lawang .....	50
Tabel 4.7 Anggaran Kegiatan terkait Program JKN Tahun Anggaran 2022 .....	51
Tabel 4.8 Puskesmas yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.....	51
Tabel 4.9 Laporan Hasil Pemantauan Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar Kabupaten Empat Lawang .....	54
Tabel 4.10 Data OPD yang telah menganggarkan iuran kesehatan Non ASN Tahun Anggaran 2023 .....	63
Tabel 4.11 Alokasi anggaran iuran PBI APBD dan PBPU Kelas 3.....	66
Tabel 4.12 Data Jumlah Peserta JKN KIS BPJS Kesehatan Per-Segmen Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 - Juli 2022 .....	71
Tabel 4.13 Jumlah SDM Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap dan Standar Ketengaan Puskesmas sesuai Permenkes 75 Tahun 2014.....	73
Tabel 4.14 Jumlah SDM Kesehatan di Puskesmas Non Rawat Inap dan Standar Ketengaan Puskesmas sesuai Permenkes 75 Tahun 2014.....	74
Tabel 4.15 Standar ratio kebutuhan SDM hingga tahun 2025 dengan target ratio per 100.000 penduduk .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori Karakteristik Evaluasi Pelayanan Kesehatan .....	25
Menurut Donabedian (1980) dan (Instruksi Presiden Nomor 8 .....	25
Tahun 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022) .....	25
Gambar 2.2 Kerangka Pikir .....	26
Gambar 3.1. Validasi Data .....	39
Gambar 4.2 Beberapa sarana dan prasarana di salah satu puskesmas non .....	52
rawat inap .....	52
Gambar 4.3 Beberapa sarana dan prasarana di salah satu puskesmas non .....	52
rawat inap .....	52
Gambar 4.4 Kebijakan yang digunakan untuk mendukung program .....	55
JKN di Kabupaten Empat Lawang.....	55
Gambar 4.5 Kebijakan yang digunakan untuk mendukung program .....	58
JKN di Kabupaten Empat Lawang.....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Permohonan Menjadi Informan
- Lampiran 2. Lembar Persetujuan (Informed Consent)
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara Mendalam 1
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara Mendalam 2
- Lampiran 5. Pedoman Wawancara Mendalam 3
- Lampiran 6. Pedoman Wawancara Mendalam 4
- Lampiran 7. Pedoman Wawancara Mendalam 5
- Lampiran 8. Pedoman Wawancara Mendalam 6
- Lampiran 9. Pedoman Wawancara Mendalam 7
- Lampiran 10. Izin Penelitian dari FKM UNSRI
- Lampiran 11. Izin Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Empat Lawang
- Lampiran 12. Izin Penelitian dari BPJS Kesehatan
- Lampiran 13. Sertifikat Uji Etik Penelitian
- Lampiran 14. Transkrip Wawancara Mendalam 1
- Lampiran 15. Transkrip Wawancara Mendalam 2
- Lampiran 16. Transkrip Wawancara Mendalam 3
- Lampiran 17. Transkrip Wawancara Mendalam 4
- Lampiran 18. Transkrip Wawancara Mendalam 5
- Lampiran 19. Transkrip Wawancara Mendalam 6
- Lmpiran 20. Trankrip Wawancara Mendalam 7
- Lampiran 21. Dokumen Anggaran
- Lampiran 22. Lampiran Laporan Puskesmas sesuai standar
- Lampiran 23. Lampiran Lainnya
- Lampiran 23. Dokumentasi Penelitian

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bappeda	: Badan Perencanaan Daerah
BP	: Bukan Pekerja
BPKAD	: Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah
BPJS	: Badan Penyelenggara Jamian Sosial
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
DJSN	: Dewan Jaminan Sosial Nasional
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DINKES	: Dinas Kesehatan
DINSOS	: Dinas Sosial
DPL	: Diatas Permukaan Laut
DPMP3A	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Perempuan dan Anak
DPMTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
FKRTL	: Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
INPRES	: Instruksi Presiden
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
JKN-KIS	: Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
OPD	: Organisasi Perangkat daerah
OSS	: Online Single Submission
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
PBPU	: Pekerja Bukan Penerima Upah
PEMDA	: Pemerintah Daerah

PKMK FK-KMK UGM	: Pusat Kebijakan Dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada
PPU	: Pekerja Penerima Upah
PSM	: Pekerja Sosial Masyarakat
SDGs	: Sustainable Development Goals
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIK-NG	: Sistem Aplikasi Kesejahteraan Next Generation
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKK	: Surat Kuasa Khusus
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TKSK	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UHC	: Universal Health Coverage
WHO	: World Health Organization
WISN	: Workload Indicators of Staffing Need

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Universal Health Coverage (UHC)* telah diidentifikasi sebagai prioritas untuk agenda kesehatan global. *UHC* berarti bahwa semua orang dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan, tanpa menderita kesulitan keuangan, dan menjadi bagian penting dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada tahun 2015. Pada bulan September 2019, semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berkomitmen kuat untuk mencapai *UHC* pada tahun 2030, dengan upaya global untuk membangun dunia yang lebih sehat untuk semua (Tao *et al.*, 2020).

*Universal Health Coverage (UHC)* mengacu pada sistem perawatan kesehatan yang memberikan cakupan perawatan kesehatan berkualitas dan perlindungan finansial kepada semua warga negara. Ini telah menjadi konsep yang diterima secara global untuk mengadvokasi akses kesehatan, dan keterjangkauan, perawatan kesehatan dan diakui dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Agar negara-negara dapat mencapai *UHC*, diperlukan serangkaian prasyarat, seperti kemauan politik dan dukungan pemangku kepentingan untuk pendanaan sektor publik yang dominan. *WHO* juga mengusulkan empat atribut penting: untuk mencapai *UHC*: sistem kesehatan yang efisien dan dikelola dengan baik; sistem pembiayaan yang terjangkau dan merata; akses ke obat-obatan dan teknologi esensial; dan tenaga kesehatan yang cukup terlatih dan termotivasi (Suzana *et al.*, 2018).

*World Health Organization (WHO)* dalam “*Health System Financing: The Path to Universal Coverage*” (*The World Health Report*, 2010) memperkenalkan tiga dimensi penting sebagai indikator capaian Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage or UHC*) yaitu: a) presentase penduduk yang dicakup, b) tingkat kelengkapan (komprehensif)

paket layanan kesehatan yang dijamin, dan c) presentase biaya kesehatan yang masih ditanggung penduduk.

Untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk atau jaminan kesehatan semesta sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada awal tahun 2014. Jaminan Kesehatan Semesta ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif, bermutu dan merata bagi seluruh penduduk (Esty, 2019).

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Presiden menekankan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam melaksanakan JKN; mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN; memastikan Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran serupa, dan mendaftarkan seluruh penduduknya sebagai peserta JKN; menyediakan sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di wilayahnya; memastikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendaftarkan pengurus dan pekerja serta anggota keluarganya dalam program JKN sekaligus pembayaran iurannya (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan., 2018).

Pada Tanggal 6 Januari Tahun 2022 Presiden kembali mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam Inpres tersebut terdapat beberapa penambahan instruksi kepada Pemerintah Daerah yaitu seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program JKN; Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelengga Negara mendaftarkan anggota keluarganya menjadi peserta aktif dalam program JKN; seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan peserta aktif program JKN; pendaftaran,

perencanaan, dan penganggaran dan pembayaran iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai peserta aktif dalam program JKN; pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai peserta aktif program JKN; adanya ketersediaan obat dan alat kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan., 2022).

Pemda sendiri selama ini memang telah menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya program JKN-KIS. Setidaknya ada tiga peran penting Pemda dalam upaya mengoptimalkan program JKN-KIS, diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan tingkat kepatuhan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan., 2016).

Pada tahun 2020 sebanyak 82% penduduk Indonesia telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN) dimana terdapat 4 (empat) provinsi yang telah mencapai kepesertaan semesta/ Universal Health Coverage (UHC), yaitu Provinsi DKI Jakarta, Papua Barat, Aceh, dan Sulawesi Utara. Cakupan kepesertaan JKN terbanyak yaitu pada penduduk Provinsi DKI Jakarta (162,9%), sedangkan Sumatera Selatan termasuk enam provinsi dengan cakupan kepesertaan JKN terendah yaitu Provinsi Riau, Maluku Utara, Jambi, Banten, Jawa, Barat dan Sumatera Selatan dengan cakupan kepesertaan JKN 74,7% (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Berdasarkan data Semester I Tahun 2021 dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, capaian kepesertaan JKN Provinsi Sumsel mencapai 85,20%. Dari 17 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Empat Lawang merupakan Kabupaten dengan capaian kepesertaan JKN terendah sebesar 57,91% (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2021).

Berdasarkan hasil survei awal di Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang capaian kepesertaan jaminan kesehatan Kabupaten Empat

Lawang belum mencapai target *Universal Health Coverage*. Program penerima bantuan iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dilaksanakan namun masih belum dapat memenuhi target capaian *UHC* di Kabupaten Empat Lawang. Kepesertaan JKN Kabupaten Empat Lawang tahun 2020 sudah mencapai 52,07% artinya masih tersisa 47,93% lagi penduduk yang belum tercover JKN (Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang, 2021).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Program JKN Dalam Upaya Menuju *UHC* di Kabupaten Empat Lawang untuk melihat bagaimana pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2017 dan kesiapan pelaksanaan Inpres nomor 1 tahun 2022 terkait Program JKN di Kabupaten Empat Lawang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Program JKN telah terlaksana sejak tahun 2014, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam implementasi Program JKN Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan. Pada tahun 2021 Kabupaten Empat Lawang merupakan Kabupaten dengan capaian kepesertaan terendah di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini mengindikasikan belum terlaksananya program JKN secara optimal. Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan program JKN dalam upaya menuju *UHC* di Kabupaten Empat Lawang dan apakah pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang telah melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dan Nomor 1 Tahun 2022 dalam Optimalisasi Program JKN di Kabupaten Empat Lawang.

### **1.3. Maksud atau Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Program JKN Dalam Upaya Menuju UHC di Kabupaten Empat Lawang.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Menganalisis parameter input (SDM, anggaran, sarana dan prasarana, metode dan Teknologi/ IT) dalam pada Pelaksanaan Program JKN Dalam Upaya Menuju UHC di Kabupaten Empat Lawang
- b. Menganalisis parameter proses (Penyusunan regulasi serta pengalokasian anggaran; Perluasan kepesertaan JKN; Sebagai syarat kelengkapan dokumen pengurus perizinan; Pekerja Penyelenggara Negara mendaftarkan anggota keluarga lain sebagai peserta program JKN; Kepesertaan Non ASN; Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran Premi PBI APBD dan bantuan iuran PBPU Kelas 3; Kepesertaan Badan Usaha; Pembayaran iuran Badan Usaha; Pengenaan Sanksi Administratif)
- c. Menganalisis parameter output capaian kepesertaan Program JKN di Kabupaten Empat Lawang

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

- a. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dan Nomor 1 Tahun 2022 Terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN di Kabupaten Empat Lawang, sehingga dapat mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
- b. Bagi Dinas Kesehatan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan sehingga kebijakan pembiayaan kesehatan kedepan lebih efektif dan efisien.



## 2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat lebih memperkaya ilmu pengetahuan dibidang kesehatan khususnya tentang pelaksanaan program JKN aspek perluasan peserta di Pemerintah Daerah.

## 3. Manfaat pada peneliti

- a. Memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang penelitian sehubungan dengan judul dan hasil penelitian ini.
- b. Sebagai sumber bacaan yang dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

## 4. Manfaat Dari Segi Kebijakan

Diharapkan dapat memberikan informasi baru mengenai kebijakan bagi seluruh elemen di Kabupaten Empat Lawang, dan dapat memberikan pemikiran untuk menanamkan kesadaran, bahwa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Empat Lawang memiliki kewajiban yang sama dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman (2012) *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan*. Doctoral dissertation, Universitas Hassanuddin.
- Amaratunga RDG and Baldry D (2002) *Performance Measurement in Facilities Management and Its Relationship with Management Theory and Motivation*, Facilities, 20(10), pp. 327–336. Available at: <http://dx.doi.org/10.1108/02632770210443009>.
- Anzari, R., S. Palutturi, and A.S. (2020) *No Legislative Role of Universal Health Coverage Achievement in Kolaka Regency* Title, Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 8(T2), pp. 41–46.
- Ayuningtyas D, et al (2018) *Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal prodi Kesehatan Masyarakat UI, 9(1), pp. 1–10.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2016) *Pentingnya Dukungan Pemda Untuk Mendukung Universal Health Coverage*. Available at: <https://bpjs-kesehatan.go.id>.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2018) *Presiden Instruksikan 11 Pimpinan Lembaga Guyup Optimalkan Program JKN-KIS*. Available at: <https://bpjs-kesehatan.go.id>.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2020) *Peserta*. Available at: <https://bpjs-kesehatan.go.id>.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2022) *Ini Penjelsan BPJS Kesehatan soal Inpres Nomor 1 Tahun 2022*. Available at: <https://bpjs-kesehatan.go.id>.
- Barber, S.L., Gertler, P.J. and Harimurti, P. (2007) *Contribution Of Human Resources For Health To The Quality Of Care In Indonesia: Staffing caps have not solved the inefficiencies within the civil-service system but might have constrained quality in the labor-intensive health sector*, Health Affairs, 26(Suppl2), p. pp.w367-w379.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang (2021) *Data Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang*.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (2021) *Data Laporan Semester I*.
- Donabedian (1980) *The Definition of Quality and Approach Its Assesment*. Ann Arbor Michigan: Health Administration Press.
- Elvarisha, E., Ridwan and Ibrahim, Z. (2020) *Penerapan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja yang Belum Mendaftarkan Pekerjaannya Menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2(2), pp. 653–670.
- Endartiwi, S.S., (2018). *Persepsi masyarakat terhadap kemauan untuk mendaftar menjadi peserta mandiri jaminan kesehatan nasional (JKN)*. Journal of Health Studies, 2(2), pp.81-92.

- Esty, J. (2019) *JKN: Perjalanan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional*, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, p. 44. Available at: [http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Final\\_JKN\\_Perjalanan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional - Copy.pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Final_JKN_Perjalanan_Menuju_Jaminan_Kesehatan_Nasional_Copy.pdf) <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/pdf?kd=3519&th=2017>.
- Hapsara Habib Rachmat, R. (2013) *Percepatan pembangunan kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Idris Haerawati, Trisnantoro Laksono, S. (2015) *Sektor Informal (Studi Evaluasi Pra Dan Pasca Jaminan Kesehatan Nasional) Expanding Informal Sector Membership in Health Insurance (Evaluation Study of Pre and Post National Health Insurance)*, □ *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 04(4), pp. 138–145.
- Inpres No 1 (2022) *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional*, Sekretariat Kabinet RI, pp. 1–23.
- Inpres No 8 (2017) *Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional*.
- Kementerian Kesehatan RI (2014) *Buku pegangan sosialisasi jaminan kesehatan nasional dalam sistem jaminan sosial nasional*.
- Kementerian Kesehatan RI (2020) *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020*. Available at: [Profil-Kesehatan-Indonesia-Tahun-2020.pdf](https://kemkes.go.id/profil-kesehatan-indonesia-tahun-2020.pdf) (kemkes.go.id).
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (2014) *Seri Buku Saku - 4: Paham JKN Jaminan Kesehatan Nasional*. Available at: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/11205.pdf>.
- Maharani, E.A., Lestari, H. and Lituhayu, D. (2014) *Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri*, *Journal Of Public Policy And Management Review*, 3(4).
- Maryuni, S., Agus, E., dan P. (2019) *Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Dalam Meningkatkan Partisipasi Kepesertaan Mandiri Bpjs Kesehatan Di Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya*, *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.33946>.
- McQuide, P.A., Kolehmainen-Aitken, R.L. and Forster, N. (2013) *Applying the workload indicators of staffing need (WISN) method in Namibia: Challenges and implications for human resources for health policy*, *Human Resources for Health*, 11(1). Available at: <https://doi.org/10.1186/1478-4491-11-64>.
- Van Minh, H. et al. (2014) *Progress toward universal health coverage in ASEAN*, *Global Health Action*, 7(1). Available at: <https://doi.org/10.3402/gha.v7.25856>.
- Moleong L (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nugraheni, W., Mubasyiroh, R. and Kusuma, R. (2019) *Peran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Mengurangi Beban Keuangan pada Perawatan Persalinan Pendahuluan Metode*, Badan Litbangkes, (November), pp. 1–7. Available at: [http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/17359-17652\\_PBRoleofJKNInd.pdf](http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/17359-17652_PBRoleofJKNInd.pdf).
- Nugraheni, W.P. and Hartono, R.K. (2017a) *Analisis Pola Layanan Kesehatan Rawat Jalan pada Tahun Pertama Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*, Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 27(1), pp. 9–16. Available at: <https://doi.org/10.22435/mpk.v27i1.6000.9-16>.
- Nugraheni, W.P. and Hartono, R.K. (2017b) *Determinan Pengeluaran Kesehatan Katastropik Rumah Tangga Indonesia Pada Tahun Pertama Implementasi Program JKN*, Buletin Penelitian Kesehatan, 45(1), pp. 27–36. Available at: <https://doi.org/10.22435/bpk.v45i1.6069.27-36>.
- Peraturan Menteri Kesehatan No 28 (2014) *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional*.
- Peraturan Menteri Kesehatan No 75 (2014) *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*.
- Peraturan Pemerintah No 6 (2021) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah*.
- Peraturan Presiden No 82 (2018) *Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 75 (2019) *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan*.
- Permendagri No 119 (2019) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa*.
- PKMK FK-KMK UGM (2021) *Laporan Reviu Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Analisis Tiga Aspek : Kepesertaan, Pelayanan, dan Pembiayaan*.
- Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang (2021) *Profil Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021*.
- Puspitaningrum, R.A. et al. (2019) *Achievement of universal health coverage in Surakarta city: policy analysis*, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Indonesia, 10(2), pp. 149–161. Available at: <https://doi.org/10.20885/jkki.vol10.iss2.art7>.
- Retnaningsih, H. (2018) *Kendala Pencapaian Target Kepesertaan Program JKN-KIS*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 10(1). Available at: [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-X-1-I-P3DI-Januari-2018-175.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-X-1-I-P3DI-Januari-2018-175.pdf).

- Rosmawati, Herman Demak, A.N. (2018) *Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang*, Sosial politik & ekonomi, pp. 162–171. Available at: <http://www.appptma.org/wp-content/uploads/2019/08/15.-Implementasi-Program-Jaminan-Kesehatan-Nasional-Jkn-Di-Puskesmas-Kota-Kecamatan-Enrekang.pdf>.
- Rukmini, R. and Oktarina, O. (2018) *Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Peningkatan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Daerah Di Kota Blitar Dan Kota Malang*, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 21(3), pp. 199–210. Available at: <https://doi.org/10.22435/hsr.v21i3.418>.
- Rukmini, Ristrini and Oktarina (2017) *Peran Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran*, Jurnal PKS, 16(3), pp. 239–250.
- Salfia Nurfadillah (2017) *Analisis Peran Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Pinrang*, Universitas Hasanuddin Makassar [Preprint].
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suzana, M. *et al.* (2018) *Achieving universal health coverage in small island states: could importing health services provide a solution?* Available at: <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000612>.
- Tao, W. *et al.* (2020) *Towards universal health coverage: Achievements and challenges of 10 years of healthcare reform in China*, BMJ Global Health, 5(3), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-002087>.
- The World Health Report (2010) *The World Health Report HEALTH SYSTEMS FINANCING*.
- Undang-Undang RI No 40 (2004) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang: SJSN (Sistem Jaminan Sosial)*.
- Utarini A (2020) *Penelitian Kualitatif dalam Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Winarni E (2012) *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan dalam Pelayanan Publik bidang Kesehatan*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Yogyakarta.
- Wulandari, G. (2020) *Upaya Peningkatan Kepatuhan Kepesertaan Bpjs Perusahaan Pada Kantor Bpjs Kesehatan Cabang Pekanbaru*, *Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau [Preprint].
- Zuchdi Darmiyati, A.W. (2019) *Analisis Konten, Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika Dalam Penelitian*. Edited by Restu Damayanti. Jakarta: PT Bumi Aksara.